

# Perjalanan Truk dan Pungutan Liar di Aceh



Penyogokan dan pungutan liar (pungli) yang harus dibayar oleh supir truk saat melalui jalan Banda Aceh - Medan menjadi biaya yang cukup tinggi dalam melakukan usaha di Aceh. Biaya yang harus dikeluarkan dalam perjalanan truk dari Medan ke Banda Aceh adalah rata-rata Rp.321.000 untuk penyogokan, pungli, dan pembayaran gelap lainnya. Jurusan sebaliknya membayar rata-rata Rp.366.296. Pengeluaran tambahan ini berdampak pada rekonstruksi tsunami dan pada konsumen dengan bentuk kenaikan harga.

Untuk menghitung dan mengkaji jumlah yang harus dibayar oleh supir truk, BRR dan Bank Dunia memantau pembayaran sejak awal bulan November 2005. Data dikumpulkan melalui peninjauan langsung oleh surveyor yang mendampingi supir truk dalam perjalanan biasa mereka dari Banda Aceh ke Medan dan kembali. Seluruhnya, terdapat 59 perjalanan yang ditinjau dari bulan November 2005 hingga Februari 2006.

Data menunjukkan penurunan yang tajam pada pungutan liar di pos keamanan yang berhubungan dengan penarikan TNI/Brimob dan polisi sebagai bagian dari perjanjian perdamaian Helsinki. Untuk perjalanan ke Aceh, jumlah yang dibayar di pos tersebut berkisar antara Rp.242.500 hingga Rp.50.666. Namun pungli di jembatan timbang bagi truk yang membawa kelebihan muatan telah meningkat, menyusul pos keamanan sebagai sumber terbesar pembayaran dalam perjalanan. Pegawai DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan) tampaknya ikut terlibat.

Truk juga membayar biaya pengawalan di Banda Aceh dan biaya 'kemudahan' kepada organisasi di Medan untuk menurunkan pembayaran pungli di jalan dan memberikan jasa keamanan. Biaya pengawalan rata-rata adalah hampir Rp.500.000 untuk satu truk yang memerlukan pelayanan tersebut – biasanya untuk truk yang membawa barang-barang yang dipertanyakan status legalnya. Truk menuju Banda Aceh biasanya membayar sedikitnya satu dari lima organisasi yang menurunkan harga di jembatan timbang dan memberikan jasa lainnya.

Seharusnya prioritas utama adalah menurunkan biaya-biaya tersebut dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai hukum dan masuk ke dalam kas negara.

## Latar Belakang dan Metode

Penyogokan dan pungli yang dibayar supir truk kepada polisi, TNI/Brimob, pegawai negara dan kelompok preman menjadi pengeluaran yang cukup tinggi dalam melakukan usaha di Aceh. Selama bertahun-tahun konflik di Aceh, petugas keamanan mengambil keuntungan dari kerusuhan dengan menarik pungli (pungutan liar) kepada supir truk dan pengendara lainnya di jalanan Aceh. Di daerah-daerah yang dikuasai, GAM juga menarik pungutan serupa. Masa darurat militer yang dimulai pada bulan Mei 2003 meningkatkan kekuasaan penegak hukum, mengakibatkan pemerasaan yang merajalela. Hanya sedikit dari tindakan tersebut yang diperiksa.

Sejak Aceh membuka diri setelah tsunami, biaya-biaya tersebut menjadi halangan dalam upaya rekonstruksi dan pemulihan.

Melalui wawancara dengan supir truk yang dilakukan oleh Bank Dunia pada bulan Maret 2005, diketahui bahwa truk dalam rute Banda Aceh ke Medan harus membayar biaya penyogokan di antara 70 hingga 110 pos yang berbeda untuk satu perjalanan. Di setiap pos, supir truk dipaksa melakukan suatu bentuk pungli, dari beberapa ribu rupiah, satu bungkus rokok, hingga Rp.100.000. Meskipun pembayaran di setiap pos jumlahnya kecil, namun total pembayaran dari semua pos menjadi tinggi. Truk dari Medan ke Banda Aceh yang membawa barang kelontong membayar rata-rata Rp.650.000 untuk pungli di setiap perjalanan. Meskipun bantuan kemanusiaan menjadi pengecualian dan tidak dipungut biaya, namun tidak halnya dengan barang-barang lain yang diperlukan untuk rekonstruksi. Pungli tersebut tidak hanya berdampak pada supir dan perusahaan truk, tetapi juga pada konsumen dengan bentuk kenaikan harga.

Untuk menghitung dengan lebih baik dan mengkaji jumlah yang harus dibayar supir truk dalam penyogokan dan pungutan liar lainnya, BRR dan Bank Dunia memantau pungli tersebut. Data dikumpulkan melalui peninjauan langsung – surveyor mendampingi supir truk dalam rute tetap mereka dari Banda Aceh ke Medan dan kembali sejak awal November 2005 hingga akhir Februari 2006. Seluruh informasi dikumpulkan dari 59 perjalanan truk, 27 dari Medan ke Banda Aceh, dan 32 dari Banda Aceh ke Medan. Di tiap perjalanan, surveyor mencatat setiap pembayaran yang dilakukan, jumlah yang dibayarkan, kepada siapa dan di mana pembayaran dilakukan (hingga ke tingkat kecamatan), informasi mengenai karakteristik truk (muatan yang dibawa, jenis truk), dan informasi mengenai perjalanan (misalnya waktu perjalanan dan kapan terjadi pembayaran). Surveyor juga mengumpulkan data atas biaya pengawalan yang harus dibayar dan biaya kepada organisasi di Medan yang membantu 'mempermudah' menurunkan biaya di jembatan timbang dan memberikan jasa keamanan. Semua data yang terkumpul memperkenankan observasi atas tren pemerasaan dan analisa sifat dasar dari kegiatan ini.

## Pungli kepada Pengendara Truk di Aceh

Sejak pemantauan dimulai di awal bulan November 2005, terdapat penurunan yang signifikan pada pungli di jalan Banda Aceh - Medan. Akan tetapi, biaya lainnya, seperti biaya pengawalan dan 'kemudahan' belum juga turun dan, secara bersamaan, pungli di jalan dan di luar jalan tetap menjadi pengeluaran yang tinggi dalam melakukan usaha di Aceh. 3

Penurunan *pembayaran di jalan* – di pos keamanan dan jembatan timbang – adalah kelanjutan dari tren sejak tahun 2005. Wawancara dengan supir truk di bulan Maret 2005 menunjukkan biaya rata-rata adalah Rp.650.000. Dalam dua minggu sejak tanggal 4 November, ketika pemantauan dimulai, rata-rata pembayaran adalah Rp.388.750. Dari wawancara yang dilakukan baru-baru ini dengan supir truk, diketahui bahwa pungli menurun pada tahun 2005 karena berbagai faktor, termasuk penarikan pasukan sebagai bagian dari perjanjian perdamaian Helsinki dan kedatangan Misi Monitoring Aceh (AMM).

Tabel 1 menunjukkan rata-rata pungli yang terjadi di jalan dari rute Banda Aceh - Medan – di pos keamanan dan jembatan timbang – untuk perjalanan menuju Aceh, dari Aceh, dan rata-rata dari semua perjalanan.

**Tabel 1: Rata-rata Pungli di Jalan (Pos dan Jembatan Timbang) Rute Banda Aceh - Medan Berdasarkan Periode Waktu**

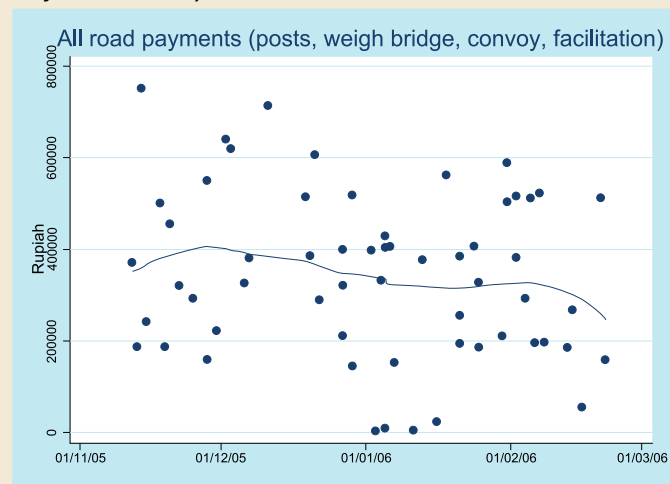
Periode 2 Minggu mulai tanggal:	Kedua Jurusan		ke Aceh		dari Aceh	
	Ongkos Rata-Rata (Rp.)	Perjalanan yang Ditinjau	Ongkos Rata-Rata (Rp.)	Perjalanan yang Ditinjau	Ongkos Rata-Rata (Rp.)	Perjalanan yang Ditinjau
4 <sup>th</sup> Nov	388,750	4	497,500	2	280,000	2
18 <sup>th</sup> Nov	177,000	8	232,750	4	121,250	4
2 <sup>nd</sup> Dec	123,400	5	198,000	2	73,667	3
16 <sup>th</sup> Dec	159,944	9	197,100	5	113,500	4
30 <sup>th</sup> Dec	147,833	9	322,625	4	8,000	5
13 <sup>th</sup> Jan	212,333	9	263,571	7	33,000	2
27 <sup>th</sup> Jan	222,100	10	357,400	5	86,800	5
20 <sup>th</sup> Feb	96,400	5	67,333	3	140,000	2

Ongkos pembayaran di jalan untuk truk yang menuju Aceh dari Medan lebih tinggi dibandingkan truk yang meninggalkan Aceh. Rata-rata, truk menuju Banda Aceh membayar Rp. 236.500 sedangkan truk meninggalkan Aceh membayar Rp. 94.074

Namun apabila biaya pengawalan dan 'kemudahan' lainnya (lihat di bawah) dimasukkan, maka jumlahnya menjadi lebih tinggi di kedua jurusan. Truk menuju Medan dengan biaya pengawalan– yang dikenakan hanya bagi truk menuju Medan – harus membayar rata-rata Rp. 366.296 Truk menuju Aceh dengan biaya 'kemudahan' – yang dikenakan hanya di Medan – harus membayar rata-rata Rp.321.000 Ongkos tambahan ini berdampak pada proses rekonstruksi tsunami.

Gambar 1 menunjukkan rata-rata tingkat pembayaran bagi truk dari kedua jurusan, termasuk biaya yang dibayar di pos keamanan, jembatan timbang, biaya pengawalan dan biaya 'kemudahan'. Garis menunjukkan tren, sedangkan titik menunjukkan ongkos yang dibayar untuk satu perjalanan. Tingkatnya telah menurun, tetapi masih tinggi; bahkan di minggu terakhir, satu truk membayar lebih dari Rp.500.000

**Gambar 1: Pungli (Pos, Jembatan Timbang, Pengawalan dan Biaya Kemudahan)**



Dalam rute menuju Banda Aceh, terdapat penurunan tajam di antara awal November dan pertengahan Desember, sebelum pembayaran meningkat lagi dengan rata-rata Rp.397.400 untuk periode dua-minggu mulai 27 Januari. Terdapat penurunan pembayaran yang tajam di akhir pemantauan (rata-rata Rp.134.000 untuk periode dua-minggu mulai 20 Februari) tetapi hal ini dipandang sebagai suatu keganjilan dan rata-rata adalah berdasarkan jumlah terbatas perjalanan truk.

Dalam rute dari Banda Aceh ke Medan, ongkos meningkat selama bulan November menjadi Rp.657.000 dalam periode 12-15 Desember. Ongkos tersebut menurun di bulan Desember, tetapi mulai naik lagi. Dalam periode dua-minggu terakhir, rata-rata kombinasi biaya adalah Rp.390.000 per truk, lebih tinggi dibandingkan total bulan November.

<sup>1</sup>Angka tersebut tidak sebanding karena total di bulan Maret berdasarkan wawancara dengan supir truk (dan karena itu bergantung dengan akurasi jumlah yang dibayar berdasarkan ingatan mereka), sedangkan total November berdasarkan peninjauan langsung. Walaupun begitu, wawancara yang dilakukan dengan supir truk di bulan Februari 2006 menunjukkan bahwa data wawancara adalah akurat, karena jumlah yang dilaporkan serupa dengan jumlah yang dicatat melalui peninjauan langsung dalam periode yang sama.

**Bentuk Pungli**

**Terdapat berbagai bentuk pungli.**

**Pos TNI/Polisi.** Di antara jalan Banda Aceh - Medan, terdapat sejumlah pos TNI dan polisi di tepi jalan. Supir diminta untuk berhenti dan membayar, biasanya dalam bentuk uang tunai tetapi kadang juga dalam bentuk minuman, seperti Krating Daeng.

**Jembatan Timbang.** DLLAJ (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) mengelola dua jembatan timbang di rute Banda Aceh - Medan. Jembatan timbang tersebut digunakan untuk menimbang berat truk agar truk tidak membawa muatan dengan kelebihan berat. Menurut undang-undang nasional, truk yang membawa kelebihan muatan harus diberikan surat tilang. Mereka kemudian harus datang ke pengadilan dan membayar denda yang diputuskan oleh hakim. Akan tetapi, pegawai di jembatan timbang sering menerima pembayaran di lokasi, dan menerima penyogokan untuk mengurangi biaya yang harus dibayar.

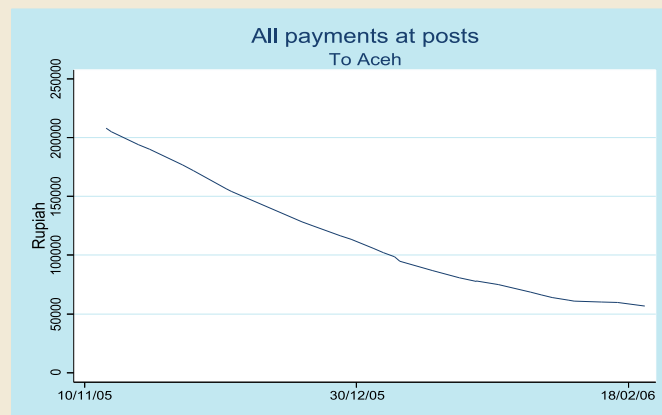
**Biaya Pengawalan.** Beberapa truk dari Banda Aceh menuju Medan membayar biaya pengawalan kepada TNI. Truk yang membayar untuk jasa ini biasanya membawa barang-barang yang dipertanyakan keberadaannya hukumnya, seperti besi bekas dan plastik bekas.

**Yayasan 'Kemudahan'.** Terdapat beberapa organisasi yang memberikan bermacam-macam 'pelayanan' bagi truk dengan membayar biaya. Pelayanan yang diberikan adalah penurunan biaya kelebihan muatan yang harus dibayar di jembatan timbang, serta perlindungan dari perampokan/pencurian muatan dan kecelakaan. Status legal organisasi-organisasi tersebut tidak jelas.

**Pembayaran di Pos**

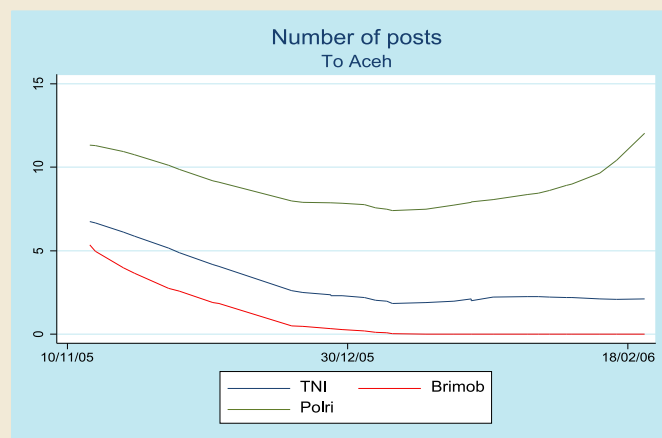
Terdapat penurunan pada jumlah pos di mana terjadi pungli. Akibatnya, jumlah yang harus dibayar juga menurun. Untuk perjalanan menuju Aceh, rata-rata jumlah pos menurun dari 28 (di awal November) menjadi 17 (di akhir Februari). Total rata-rata dari yang harus dibayar menurun dari Rp.242.500 menjadi Rp.50.666 (lihat Gambar 2).

**Gambar 2: Jumlah yang Dibayar Di Pos Keamanan – Perjalanan ke Banda Aceh dari Medan**



Seperti yang bisa di lihat di Gambar 3, jumlah pos TNI yang menarik pungli menurun dari 7 menjadi 2 selama proses pemantauan. Pos Brimob telah dihapuskan. Pos yang tersisa biasanya dikendalikan oleh polisi. Setelah penurunan awal atas jumlah pos polisi, terdapat kenaikan di bulan terakhir. Polisi mulai menduduki pos-pos yang ditinggalkan oleh TNI dan Brimob karena proses perdamaian.

**Gambar 3:Jumlah Pos (TNI, Brimob, Polisi) – Perjalanan ke Banda Aceh dari Medan**





sering menjadi korban kekerasan dan gangguan. Setelah penarikan pasukan, Organisasi Tiga berusaha merubah peranannya dengan menawarkan jasa kombinasi yang diberikan Organisasi Satu dan Organisasi Dua. Anggota diwajibkan untuk membayar uang pendaftaran sejumlah Rp.100.000 dan biaya bulanan sejumlah Rp.55.000. Anggota membayar Rp.10.000 per kelebihan ton di jembatan timbang. Ketika terjadi kecelakaan, Organisasi Tiga membantu menangani surat-surat yang diperlukan.

Organisasi Empat memberikan jasa serupa di jembatan timbang; anggota membayar Rp.10.000 per kelebihan ton. Biaya bulanan adalah Rp.50.000 untuk pelayanan ini. Semua anggota memiliki tanda di kaca depan bagian tengah dengan logo Organisasi Empat. Beberapa juga menggunakan stiker bertulisan suatu unit koperasi militer.

Organisasi Lima membantu truk akan kecelakaan lalu lintas. Hanya beberapa truk menggunakan pelayanan ini.

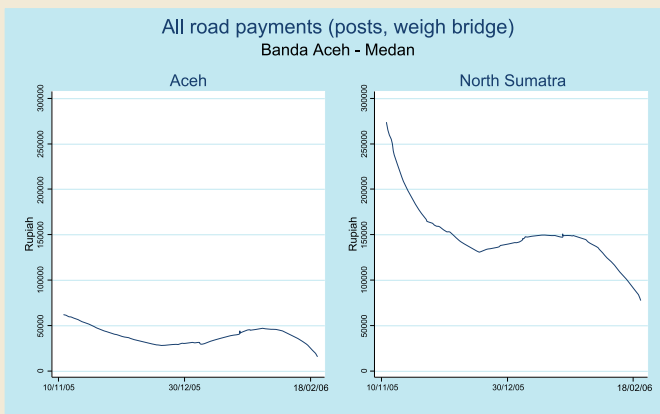
Biaya-biaya ini yang harus dibayar – terutama untuk setiap kali perjalanan – cukup tinggi. Dalam 13 dari 59 perjalanan, truk membayar biaya kemudahan (biasanya untuk Organisasi Satu) rata-rata Rp.140.000. Dalam 49 dari 59 perjalanan, truk membayar biaya bulanan antara Rp.25.000-30.000.

**Tingkat Pungli di Jalanan Aceh dan Sumatra Utara**

Hampir semua biaya dalam perjalanan dibayar di Sumatra Utara. Rata-rata jumlah yang dibayar di pos dan jembatan timbang di Aceh adalah Rp.39.076; sedangkan di Sumatra Utara Rp.146.899. Mayoritas pembayaran di Aceh dilakukan setelah Lhokseumawe saat truk berjalan ke arah selatan. Perbedaan yang lebih besar antara Aceh dan Sumatra Utara adalah pada biaya di jembatan timbang. Di jembatan timbang Seumadam, Tamiang, Aceh, truk membayar rata-rata Rp.15.898; di jembatan timbang Gebang di Sumatra Utara, rata-rata pembayaran adalah Rp.91.864.

Seperti yang bisa dilihat di Gambar 5, pembayaran di jalan telah berkurang di Aceh dan Sumatra Utara, tetapi masih tinggi di Sumatra Utara.

**Gambar 5: Pembayaran Jalan (Pos dan Jembatan Timbang) Banda Aceh - Medan – Perpindahan**



Propinsi Pos di mana terjadi pungli di tiap propinsi jumlahnya serupa, dengan rata-rata 5.7 di Aceh dan 7.8 di Sumatra Utara. Namun lebih dari dua kali lipat ongkos yang harus dibayar di pos Sumatra Utara dibandingkan pos Aceh: rata-rata Rp.57.703 di Sumatra Utara dan Rp.23.178 di Aceh.

Penurunan pembayaran yang baru-baru ini terjadi di Sumatra Utara berhubungan dengan upaya polisi daerah untuk menangkap pelaku pungli. Di akhir Januari, terdapat pernyataan terbuka atas upaya untuk menghapus pungli, dan hal ini telah menurunkan pembayaran di jalan. Namun, pemantauan yang berkelanjutan masih dibutuhkan untuk melihat apakah tren ini tetap berjalan.

<sup>6</sup>Biaya bulanan tersebut (dan biaya tahunan, yang tidak tertangkap dalam data kami) tidak termasuk di dalam analisis rata-rata biaya perjalanan, di atas.

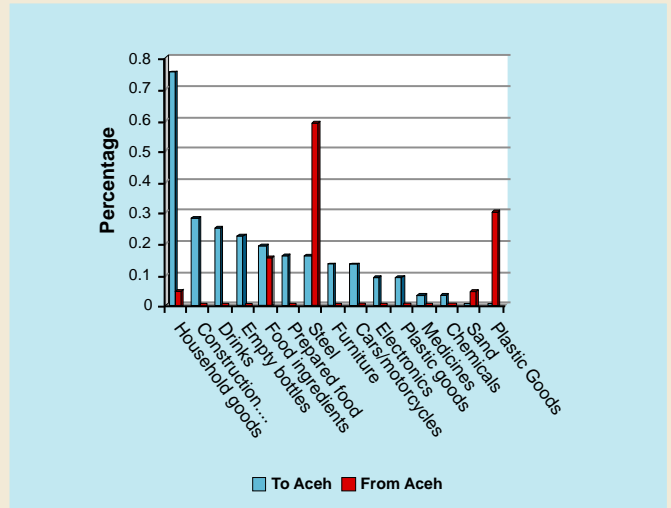
<sup>7</sup>Truk seringkali membawa lebih dari satu jenis muatan, karena itu jumlahnya bertambah hingga lebih dari 100%.

<sup>8</sup>Perlu dicatat bahwa sampel kami bukan merupakan representative semua perjalanan truk, dan karena itu barang yang masuk dan keluar Aceh dalam truk sampel kami tidak perlu digunakan sebagai representatif dari semua barang yang masuk dan keluar propinsi.

**Perbedaan Ongkos untuk Jenis Muatan yang Berbeda**

Berbagai muatan dibawa oleh truk yang dipantau keluar dan masuk Aceh. Gambar 6 menunjukkan persentase truk yang membawa berbagai muatan dalam setiap jurusan. Untuk truk menuju Aceh, 75% membawa barang-barang rumah tangga, 35% makanan (bahan-bahan dan makanan jadi), 28% bahan bangunan, 25% minuman dan 16% besi bekas. Untuk truk meninggalkan Aceh, 59% membawa besi bekas, 30% barang plastik dan 22% botol kosong.

**Gambar 6: Barang Muatan Truk Masuk dan Keluar Aceh dalam Jalan Banda Aceh - Medan**



Truk yang membawa berbagai jenis muatan membayar biaya yang berbeda. Seperti yang bisa dilihat di Tabel 3, biaya di jembatan timbang dan pos adalah yang tertinggi bagi truk yang membawa hasil pertanian atau makanan (Rp.284.667 dan Rp.276.633 secara berurutan). Truk yang membawa besi bekas membayar kurang dari sepertiga dari jumlah tersebut. Namun bila biaya pengawalan dimasukkan dalam jumlah yang dibayarkan untuk mengantar besi bekas, maka pengeluarannya akan menjadi lebih tinggi dibandingkan ongkos jenis muatan lainnya.

**Tabel 3: Ongkos Jenis Muatan yang Dibawa Truk Keluar dan Masuk Aceh**

Jenis Muatan	Perjalanan	Ongkos rata-rata tiap perjalanan (tanpa biaya pengawalan) – Rp.	Ongkos rata-rata tiap perjalanan (termasuk biaya pengawalan) – Rp.
Besi bekas	21	93,666	424,619
Hasil pertanian	3	284,667	284,667
Makanan	15	276,633	276,633
Barang pabrik	34	195,838	251,681
Obat-obatan	1	154,000	154,000

**Penutup**

Pungli tetap menjadi pengeluaran yang cukup tinggi dalam melakukan usaha dan rekonstruksi di Aceh. Setelah empat bulan pemantauan, data menunjukkan penurunan pada tindakan ilegal di jalan Banda Aceh - Medan, karena penarikan pasukan sesuai dengan mandat dalam perjanjian perdamaian di Helsinki. Namun uang sogokan yang dibayarkan kepada pegawai negara di jembatan timbang telah meningkat, sama halnya dengan biaya yang dibayarkan kepada organisasi di Medan untuk berbagai macam pelayanan dalam perjalanan. Biaya pengawalan masih tinggi.

Penurunan pungli tersebut harus dijadikan prioritas. Hal ini membutuhkan pemantauan yang netral di pos-pos keamanan dan jembatan timbang, pemeriksaan truk yang menggunakan pengawalan untuk memastikan bahwa muatan yang dibawa sesuai dengan hukum dan untuk menolak pungli, serta investigasi organisasi-organisasi di Medan yang berkolusi dengan pegawai negara.